



URGENSI *QAWA'IDH FIQHIIYAH* DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Kholidah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: kholidahnasti@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the urgency of qawa'id fiqhiyyah in the development of Islamic law. The rationale departs from the definition of the fiqhiyyah rule itself, namely a collection of syara' laws from various legal events that have the same 'illat. This meaning assumes that fiqhiyyah rules actually have a role in the development of Islamic law. Bearing in mind that each rule contains 'illat law, legal rationale and also philosophical values that can be used as a basis for establishing a law in a new case. This study uses a normative juridical method, with secondary data in the form of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data were taken from the literature as a data source, then analyzed and described systematically. The conclusions drawn are, 1) qawa'idh fiqhiyyah can be used as an alternative in resolving legal issues for which there is no explanation. 2) Qawa'id fiqhiyyah contains quite high dynamic values. 3), Qawa'id fiqhiyyah is able to realize legal elasticity to be applied in various contexts and. 4) Qawa'id fiqhiyyah contains the values of the contextualization of Islamic law.

Keywords: Urgensi, Kaidah Fiqhiyyah, Islamic Law

A. Pendahuluan

Syihabuddin al-Qarafi mengatakan, dalam syari'at atau hukum Islam dikenal dua kaidah yaitu kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah *ushuliyah* merupakan penghubung antara dalil dan hukum, berfungsi untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang *tafsili*. Sedangkan kaidah *fiqhiyyah* merupakan kumpulan dari berbagai hukum dengan *'illat* yang sama, dengan maksud untuk mempermudah ulama dalam mengetahui dan memahaminya. Jadi, keberadaan dua kaidah ini berbeda, kaidah *ushuliyah* bermula dari pemahaman terhadap Alquran dan sunnah sebagai sumber hukum, kemudian melahirkan kaidah *ushuliyah*. Sedangkan kaidah *fiqhiyyah* bermula dari hukum *furu'*, hasil



dari kaidah *ushuliyah*, yang berserakan lalu diikat dengan sebuah kaidah untuk memudahkan para ulama dalam mempelajari dan memahaminya.

Namun belakangan, fungsi kaidah *fiqhiyyah* meluas. Ulama-ulama kontemporer seperti Al-Qarafi, Mustafa Ahmad az-Zarqa, Asy-Syatibi, ‘Izz ad-Din Ibn Abdi as-Salam dan ulama lainnya mengatakan, kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang telah dirumuskan para ulama terdahulu dapat membantu seorang ulama fiqh dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya bahwa kaidah *fiqhiyyah* untuk konteks sekarang dapat dijadikan sebagai metode dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan dan perubahan masyarakat. Tanpa harus secara langsung mengembalikan permasalahan tersebut kepada sumber hukumnya (Al-Qur’an dan as-Sunnah). Atau disibukkan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah* yang terkesan rumit dan butuh waktu yang panjang. Mengingat, dalam setiap kaidah terdapat *‘illat* yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menetapkan berbagai persoalan hukum lainnya yang belum ada ketetapan hukumnya.

Atas dasar pemikiran itu, penulis kemudian mencoba menganalisis sejauh mana urgensi kaidah *fiqhiyyah* sebagai metode dalam pengembangan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus penelitian bertujuan untuk menganalisis urgensi kaidah *fiqhiyyah* dalam pengembangan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari pustaka, karena itu penelitian ini juga tergolong penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dibutuhkan terdiri dari tiga bahan hukum. Bahan hukum primer, seperti kitab *Asbah wa an-Nazhair*, *Qawa'idh al-Fiqhiyyah*, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, menjelaskan tentang konsep kaidah *fiqhiyyah* dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia. Data kemudian dianalisis dengan bertumpu pada pencarian makna simbolik dari pemikiran. Selanjutnya dideskripsikan secara sistematis dengan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya.

C. Pembahasan

Pengertian *Qawa'idh Fiqhiyyah*



Qawa'idh fiqhiyah dalam bahasa Indonesia disebut kaidah-kaidah fiqh, terdiri dari dua kata, yaitu kata *qawa'idh* dan kata *fiqhiyyah*. Kata *qawa'idh* bentuk *jama'* dari kata *qa'idah* yang berarti dasar atau fondasi sesuatu, baik bersifat konkrit atau *hissi*. Seperti pondasi rumah maupun bersifat abstrak atau *ma'nawi* seperti *ushul al-din* (dasar-dasar agama). Sebagaimana ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:” (Ingatlah), ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar (fondasi) baitullah, seraya berdo'a; ya Tuhan Kami terimalah dari kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* dengan menambah *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan dan pembangsaan. Kata ini secara etimologi berarti memahami sesuatu secara mendalam.¹Sedangkan secara terminologi adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية
Artinya: ”Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”.²

Dengan demikian, kaidah *fiqhiyyah* secara bahasa adalah ketentuan aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum fiqh yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat dua kelompok. Kelompok yang memandang bahwa kaidah *fiqhiyyah* bersifat mayoritas, *aghlabiyah* atau *aktsariyah*. Menurut mereka, kaidah *fiqhiyyah* adalah:³

هي حكم شرعى فى قضية اغلبية يتعرف منها احكام ما دخل تحتها
Artinya:”Hukum syara' tentang peristiwa yang bersifat mayoritas yang darinya dapat dikenali hukum berbagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya”.

Sedangkan, yang memandang kaidah bersifat *kulli* (menyeluruh, universal) memberi definisi, di antaranya:⁴

اصول فقهية كلى يتضمن احكاما تشريعية عامة من ابواب متعددة فى
القضايا تحتى موضوعها

¹ Dikutip dari Ade Dede Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 1

² Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th), h. 11

³ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h. 43

⁴ *Ibid.*, h. 45



Artinya: "Dasar fiqh yang bersifat universal mengandung hukum syara' bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kajiannya".

Ulama yang memandang bahwa kaidah *fiqhiyyah* itu bersifat *aglabiyah* (mayoritas) bukan *kulliyah* beralasan bahwa, seluruh *qawaidh fiqhiyah* ternyata mempunyai pengecualian, sehingga sebutan *kully* atau universal kurang tepat. Sedangkan ulama yang memandang bahwa kaidah *fiqhiyyah* itu bersifat universal, beralasan bahwa pengecualian yang terdapat dalam *qawa'idh fiqhiyyah* relatif sedikit, bahkan menurut mereka pengecualian (*istisna'*) tidak mempunyai hukum sehingga tidak mengurangi sifat *kully qawaidh fiqhiyyah* tersebut.⁵

Terlepas dari dua pandangan ini, kaidah *fiqhiyyah* pada prinsipnya berangkat dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah *juz'iyah* sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya.

Sejarah Perkembangan *Qawa'idh Fiqhiyyah*

Secara historis, *qawa'idh fiqhiyyah* menjadi satu disiplin ilmu diperkirakan pada abad ke-4 H, ketika ruh taqlid terjadi. Di mana para ulama dalam membahas hukum dari suatu persoalan baru hanya mampu mengembalikan kepada fiqh mazhab. Lalu, ketika hukum *furu'* dan fatwa para ulama semakin berkembang, seiring dengan semakin banyaknya persoalan, para ulama kemudian berinisiatif mengikat hukum-hukum *furu'* tersebut ke dalam suatu kaidah untuk memudahkan pemahaman sekaligus memelihara hukum *furu'* dan fatwa ulama dari kesemerautan.⁶

Ulama yang pertama mengkaji *qawa'idh fiqhiyyah* berasal dari fuqaha Hanafiyah. Mereka mendasarkan pemikirannya kepada hukum *furu'* imam mazhabnya. Di antaranya Abu Hasan al-Karkhi (w. 340 H) dalam risalahnya "*Ushul al-Karkhi*" dan Abu Zaid al-Dabbusi dalam kitab "*Ta'sis al-Nadhar*".⁷ Kemudian disusul dari kalangan mazhab Maliki Muhammad bin Haris al-Khasyani (w. 361 H) dengan kitabnya "*Ushul al-Futya*" dan juga kalangan mazhab Syafi'i Abu Muhammad Abdillah bin Yusuf al-Juwayni

⁵Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista Surabaya, 2006), h. 10

⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 449

⁷Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), h. 10. Lihat juga, an-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Ibid.*, h. 99



(w.438) dengan kitab “*al-Furuq*”.⁸ Jadi, abad ke IV H dapat dikatakan sebagai awal pengkodifikasian ilmu *qawa'idh fiqhiyyah*.

Pada abad ke-VII dan abad ke VIII H perkembangan *qawa'idh fiqhiyyah* sangat signifikan, bahkan disebut sebagai abad keemasan. Hal ini di tandai dengan munculnya sejumlah karya dari masing-masing mazhab. Seperti, Muhammad bin Ibrahim al-Jajarni al-Sahlaki (w. 613 H) dengan kitabnya “*al-Qawa'id fi-Furu' al-Syafi'iyah*”, ‘Izzuddin bin Abdissalam (w.660 H) dengan kitabnya “*Qawa'idh al-Ahkamfi Mashalih al-Anam*”, Al-Subki al-Syafi'i (w. 771 H) dengan bukunya “*Al-Asybah wa al-Nadhair*”, Muhammad bin Abdillah bin Rasyid al-Bakri al-Qafshiy al-Maliki dengan bukunya “*al-Amzhab fi Dhabt Qawa'idh al-Mazhab*”. Al-Maqarri al-Maliki dengan (w.758 H) dengan kitabnya “*Al-Qawa'idh*”. Usman Al-Ghazzi (w. 799 H) dengan bukunya “*Al-Qawa'idh al-Furu'*”. Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dengan kitabnya “*Qawa'idh fi al-Fiqh*” dan lain-lain.⁹

Demikian juga pada abad ke- X H, abad ke-XI dan ke-XII H. Para ulama semakin banyak menaruh perhatian, karena menganggap kaidah *fiqhiyyah* yang telah disusun sebelumnya memiliki manfaat besar. Imam al-Suyuti (w. 911 H) telah berusaha mengumpulkan *qawa'idh fiqhiyyah* yang disusun al-'Alai (w. 762), al-Subki (w. 771 H), dan al-Zarkasyi (w. 794 H) dengan nama kitabnya “*al-Asybah wa al-Nadhair*”. ‘Alamah Abu Hasan al-Zaqqaq al-Tujibi al-Maliki, menyusun kitab “*Qawa'idh fiqhiyyah*” dengan mengambil rujukan dari kitab “*al-Furuq*” karya imam Qarafi (w.684 H) dan kita “*Qawa'idh*” karya al-Maqqari (w. 758 H.) Begitu juga Ibn Nuja'im al-Hanafi (w. 970 H.), dengan nama kitab “*Al-Asybah wa al-Nadhair*”, yang merujuk kepada imam al-Subki (w. 771 H) dan imam al-Suyuti (w. 911 H).¹⁰

Pengkodifikasian *qawa'idh fiqhiyyah* mencapai puncaknya ketika “*Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*” disusun oleh Komite (Lajnah) Fuqaha pada akhir abad ke-XVIII atau tahun 1292 H, tepatnya masa Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan Utsmani. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* ini memuat 99 kaidah fiqh yang menjadi landasan dari setiap pasalnya. Keberadaan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* ini pada gilirannya menjadikan kaidah *fiqhiyyah* populer, karena *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* menjadi merupakan rujukan (referensi) peradilan pada masa itu. Bahkan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*

⁸ Rohayana, *Ilmu Qawa'idh*, *Ibid.*, h. 61. Lihat juga, Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, *Ibid.*, h. 32

⁹ An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Ibid.*, h. 102. Lihat juga, Rohayana, *Ilmu Qawa'idh*, *Ibid.*, h. 61 dan Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, *Ibid.*, h. 34-36

¹⁰ An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Ibid.*, 104. Lihat juga, Rohayana, *Ilmu Qawa'idh*, *Ibid.*, h. 63-64



memberi kontribusi dalam perkembangan fiqh dan perundang-undangan di dunia Islam lainnya.¹¹

Dalam catatan Abdurrahman al-Sya'ani, ada tiga model penyusunan pada periode ini. Pertama, disusun sesuai dengan urutan bab dalam kitab fiqh seperti kitab *"al-Asybah wa al-Nazhair"* karya Ibn al-Mulaqqan. Kedua, disusun berdasarkan huruf *Hijaiyah*, seperti kitab *"al-Matsur fi al-Qawa'id"* karya al-Zarkasyi dan. Ketiga, disusun dengan cara membagi kaidah-kaidah tertentu dalam beberapa bab atau bagian tertentu, seperti kitab *"Asybah wa al-Nazhair"* karya Ibn al-Subki.¹² Namun demikian ada dua hal yang harus di catat dalam penyusunan ilmu kaidah *fiqhiyyah* ini. Pertama, ilmu kaidah *fiqhiyyah* disusun berdasarkan proses induksi dari ayat-ayat Alquran dan teks-teks sunnah. Kedua, penyusunan ilmu kaidah *fiqhiyyah* merupakan induksi dari berbagai permasalahan hukum yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Urgensi Kaedah *Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Hukum Islam

Perumusan dan penghimpunan kaidah *fiqhiyyah* di kalangan para mujtahid (abad ke-IV H), pada mulanya hanya dimaksudkan untuk memelihara hukum *furu'* yang diwariskan oleh para pendahulunya dari kesemerawutan, keruwetan juga kesan kontradiksi yang terjadi antara satu hukum dengan hukum lainnya. Tetapi seiring waktu, kaidah *fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting dalam pengembangan hukum Islam. Mengingat, kaidah *fiqhiyyah* sebenarnya memuat *'illat-illat* hukum, prinsip-prinsip dasar syari'at dan rumusan-rumusan hukum secara general. Sehingga memungkinkan untuk diaplikasikan terhadap persoalan-persoalan hukum baru.

Al-Qarafi dalam kitabnya mengatakan, untuk konteks sekarang solusi untuk menetapkan hukum tentang suatu persoalan yang tidak disebutkan ketentuannya di dalam *nash* adalah dengan pendekatan kaidah *fiqhiyyah*. Mengingat, di dalam kaidah *fiqhiyyah* telah tergambar secara jelas prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum. Bahkan kaidah *fiqhiyyah* mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dhawabit* yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manat* (*'illat*) dari segi keterkaitan meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.¹³ Al-Suyuti¹⁴ dan

¹¹ *Ibid.*, h. 65

¹² Adul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, *Ibid.*, h. 77

¹³ Al-Qarafi, *al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi al-Anwa' al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1998), h. 6-7

¹⁴ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abdurrahman as-Suyuti, *Asybah wa an-Nadzhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 5. Lihat juga, 'Izzudin Abd as-Salam, *Qawa'idh al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th), jilid I, h. 6-7



juga Mustafa Ahmad az-Zarqa,¹⁵ mengatakan melalui kaidah *fiqhiyyah* maka hukum-hukum beragam persoalan aktual yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh klasik dapat di-*ilhaq*-kan, di-*takhrij* atau diaplikasikan kepada banyak persoalan-persoalan kontemporer yang belum tersentuh oleh *nash* atau ulama-ulama terdahulu.

Kemudian di dalam banyak literatur juga disebutkan bahwa, *qawa'idh fiqhiyyah* pada umumnya diakui para ulama sebagai dalil dalam berfatwa, sebab *qawa'idh fiqhiyyah* itu juga bersumber dari Alquran dan sunnah. Berhujjah dengan *qawa'idh fiqhiyyah* ibarat dengan berhujjah dengan sumbernya (Alquran dan sunnah).¹⁶ Bahkan menurut al-Qarafi, setiap kesimpulan hukum yang tidak disertai dengan kaidah *fiqhiyyah*, maka hukum tersebut tidak kuat dan bahkan dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan akan hukum tersebut.¹⁷

Muhammad 'Awwamah juga mengatakan, kaidah *fiqhiyyah* sekalipun dibentuk dari masalah-masalah fiqh, tetapi juga bisa dijadikan sebagai dalil dalam berfatwa. Karena, fiqh itu juga diperoleh melalui pemahaman terhadap *nash* (Alquran dan sunnah). Baginya, sesuatu yang di-*istinbath*-kan atau digali dari *nash* juga harus dihormati sebagaimana menghormati *nash*-nya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, *qawa'idh fiqhiyyah* termasuk dalil *ra'y*.¹⁸ Pendapat yang sama juga dilontarkan Asy-Syatibi. Beliau mengatakan, *qawa'idh fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Dengan alasan bahwa, Alquran juga sunnah sebagai landasan hukum *taklif*, di samping memberi petunjuk terhadap hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukan terhadap salat, zakat, puasa haji dan lain-lain, juga memberi petunjuk terhadap kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukannya bahwa *ijma'*, *qiyas*, *qaul sahabi*, *syar'u man qablana* sebagai hujjah, termasuk *qawa'idh fiqhiyyah*.¹⁹

Di tempat lain, 'Izz ad-diin Ibn Abdi as-Salam dengan ungkapan lain mengatakan bahwa *qawa'idh fiqhiyyah* jalan meraih *maslahat* dan menolak *mudharat*. Karena dapat memberi kemudahan bagi para ulama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru

¹⁵Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'amm*, (Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah, 1983), jilid II, h. 943

¹⁶ Mazhab Hanbali sepakat mengatakan bahwa *qawa'idh fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Sedangkan mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki mayoritas menjadikan *qawa'idh fiqhiyyah* sebagai dalil hukum. Di kutip dari, Toha Andiko, Pemberdayaan *Qawa'idh Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 108

¹⁷ Al-Qarafi, *al-Furuq wa Anwar*, *Ibid*, h. 3

¹⁸ Muhammad Awwamah, *Atsaral-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf Aimmah al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), 68

¹⁹Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.th), h. 21-22



secara cepat, tepat dan tuntas, tanpa harus memahami dan meneliti *nash* atau terlebih dahulu menguasai kaidah-kaidah *ushuliyah* secara sempurna.²⁰ Meskipun dalam penggunaannya, tetap dituntut untuk hati-hati, tidak boleh sembarangan. Sebagaimana instruksi khalifah Umar bin Khattab untuk tetap memperhatikan aspek “*nadhair al-furu*” yakni perimbangan antar masalah-masalah *furu’iyyah* dengan aspek “*asybah*” keserupaan. Sebab, sangat mungkin antara kasus yang sepintas tampak serupa ternyata memiliki sifat kekhususan.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa kaidah *fiqhiyyah* memiliki urgensi yang tinggi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap persoalan-persoalan baru seiring dengan dinamika kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan. Karena kaidah *fiqhiyyah* mampu *me-manage* beragam persoalan *furu’iyyah* yang terus berkembang dan tak terhitung jumlahnya. Setiap satu kaidah mengandung beragam *furu’iyyah* yang tak terhitung jumlahnya.

Aplikasi Kaidah *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Hukum

Berikut beberapa contoh kaidah *fiqhiyyah* yang menunjukkan urgensi tinggi dalam pengembangan hukum Islam. Di antaranya:

1. Kaidah²¹

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.²²

Kaidah ini mengisyaratkan adanya kebebasan bagi manusia untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada.²³ Kaidah di atas juga dapat dipahami bahwa umat Islam dalam segala aktivitas, selain ibadah *mahdhah*, seperti perekonomian, politik dan juga

²⁰Izz ad-din Ibn Abdi as-Salam, *Qawa'idh al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th), jilid 1, h. 5-7.

²¹ Al-Suyuti, *Asybah wa an-Nadhair*, *Ibid.*, h. 42

²² Terdapat sejumlah redaksi yang berbeda dengan kaidah ini, yaitu 1) الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل الدليل على تحريمه
الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل الدليل على 2. ان يدل الدليل على تحريمه

²³Kaidah ini didasarkan kepada dalil *istishab*, yakni berdalil dengan metode mengembalikan kepada hukum asalnya. Menurut mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah, metode ini dapat dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan dan menetapkan hukum-hukum baru dalam persoalan mu'amalah kontemporer. Lihat, Abu bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jilid II, h. 225



kenegaraan diberi kebebasan yang luas untuk melakukan kreativitas dan inovasi sesuai dengan kemaslahatan sepanjang tidak melanggar ketentuan umum dalam syara'.

Imam as-Suyuti mengatakan, apa yang Allah halalkan itu halal dan apa yang Allah haramkan itu haram dan apa yang Allah diamkan maka itu itu dimaafkan.²⁴ Bahkan Muhammad at-Tamimi dalam kitabnya mengatakan, kaidah ini mengisyaratkan bahwa, tidak ada hak bagi seseorang untuk mengharamkan, mewajibkan, menyunatkan atau memakruhkan sesuatu, dan segala yang didiamkan oleh syari' maka hal itu dimaafkan.²⁵

Ibnu Qayyim ditempat yang berbeda juga mengatakan, seandainya Allah mendiamkan tentang kebolehan atau keharaman sesuatu, tetapi memaafkan hal itu, maka tidak ada yang boleh menghukuminya dengan haram atau membatalkannya. Sebab, halal adalah apa yang Dia halalkan, haram apa yang Dia haramkan dan apa yang Dia diamkan adalah dimaafkan. Jadi semua syarat, perjanjian dan juga mu'amalah yang didiamkan oleh syari'at maka tidak boleh mengatakannya haram. Karena mendiamkan hal itu merupakan bentuk kasih sayang-Nya bukan karena lupa dan membiarkannya.²⁶

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya "*al-Qawa'idh al-Hakimah li fiqhil Mu'amalah*" mengatakan, kaidah di atas merupakan ruh dari prinsip *mu'amalah* manusia. Karena, kaidah ini memberi ruang yang sangat luas dalam perkembangan *mu'amalah* sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia dalam berbagai bentuk dan jenisnya.²⁷ Untuk itu, melalui kaidah ini seseorang diberi wewenang untuk mengembangkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya atau itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada.

Di Indonesia, kaidah ini telah dipergunakan secara luas dalam mu'amalah. Ini dapat dilihat dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI). Dari tahun 2000 s/d 2022, DSN-MUI telah melahirkan fatwa terkait ekonomi syari'ah sebanyak 152 kasus. Dari 152 kasus tersebut, DSN-MUI menggunakan kaidah di atas sebanyak 147 kali atau \pm 95%, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:²⁸

²⁴ Al-Suyuti, *Asybah wa an-Nadzhair, Ibid.*, h. 42

²⁵ Muhammad at-Tamimi, *Arba' al-Qawa'id Taduru al-Ahkam 'Alaihi*, (Maktabah al-Misykah), h. 4

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (t.t.p.: Dar Ibn al-Jauziyah, t.t.), jilid I, h. 344-345

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawa'idh al-Hakimah Li Fiqhil Mu'amalah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2010), h. 4

²⁸ Lihat; H.M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 42-849. Lihat Juga, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>



No. Fatwa	Subyek Fatwa	Kaidah Fiqh
01/DSN-MUI/IV/2000	Giro	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
05/DSN-MUI/IV/2000	Jual beli salam	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
06/DSN-MUI/VI/2000	Jual beli istishna'	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
09/DSN-MUI/VI/2000	Pembiayaan Ijarah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
11/DSN-MUI/VI/2000	Kafalah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
12/DSN-MUI/VI/2000	Hawalah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam murabahah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem distribusi hasil usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip distribusi hasil usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam murabahah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
17/DSN-MUI/IX/2000	Saksi atas nasabah mampu menunda pembayaran	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan penghapusan aktiva produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
21/DSN-MUI/IX/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
23/DSN-MUI/III/2002	Potongan pelunasan dalam Murabahah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
25/DSN-MUI/III/2002	Rahn	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiyah bi-Tamlik	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Hutang	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi syari'ah (Sukuk)	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi syari'ah Mudharabah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Kredit (L/C) Impro Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Kredit (L/C) Ekspor Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadhia'h Bank Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility (at-Tashilat al-Saqfiyah)	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak mampu Membayar	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
49/DSN-MUI/II/2005	Konversi akad Murabahah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syariaah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
54/DSN-MUI/X/2006	Syari'ah Card	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Kredit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bilujrah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syari'ah Mudhrabah Konversi	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
60/DSN-MUI/I/2007	Penyelesaian Utang Dalam Import	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Ekspor	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
62/DSN-MUI/XII/2007	Akad Ju'alah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
66/DSN-MUI/III/2008	Waran Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
68/DSN-MUI/III/2008	Ijarah Sale and Lease Banck	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syari'ah Negara	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
71/DSN-MUI/VI/2008	Sale and Lease Banck	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syari'ah Negara	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
73/DSN-MUI/XI/2008	Musyarakah Mutanaqisyah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
75/DSN-MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
76/DSN-MUI/VI/2010	SBSN ijarah Asset to be Leased	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
77/DSN-MUI/VI/2010	Jual Beli Emas secara Tidak Tunai	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan prinsip Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
79/DSN-MUI/III/2011	Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Perjanjian Berakhir	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoniti Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoniti	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah Jasa perjalanan Umrah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di LKS	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
85/DSN-MUI/XII/2012	Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah Dalam Penghimpunan Dana LKS	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pemerataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan syari'ah	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
90/DSN-MUI/IV/2014	Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar LKS	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi	الاصل فى المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan yang disertai Rahn	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan Dalam Bisnis Properti	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
94/DSN-MUI/IV/2014	Repo Surat Berharga Syari'ah Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
95/DSN-MUI/IV/2014	Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Wakalah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
96/DSN-MUI/VI/2015	Transaksi Lindung Nilai Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syari'ah Untuk Program Pensiunan	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
101/DSN-MUI/X/2016	Akad Ijarah al-Maushufah fi al-Azimmah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
102/DSN-MUI/X/2016	Akad Ijarah al-Maushufah fi al-Azimmah Untuk Produk Pembiayaan Rumah indent	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subyek Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi jiwa syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuidasi Jangka Pendek Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli Murabahah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
112/DSN-MUI/IX/2017	Akad Ijarah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
113/DSN-MUI/IX/2017	Akad Wakalah bil Ujrah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
114/DSN-MUI/IX/2017	Akad Syirkah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
115/DSN-MUI/IX/2017	Akad Mudharabah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
120/DSN-MUI/II/2018	Sikuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
121/DSN-MUI/II/2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
122/DSN-MUI/VII/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
123/DSN-MUI/VII/2018	Penggunaan Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Keuangan Bisnis Syariah dan Perekonomi Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
124/DSN-MUI/VII/2018	Penerapan Prinsip Syariaiah dalam Pelaksanaan layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



125/DSN-MUI/VII/2018	Kontrak investasi Kolektif Efek-beragun aset Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
126/DSN-MUI/X/2019	Akad Wakalah bil istismar	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
127/DSN-MUI/X/2019	Sukuk Wakalah bil istismar	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
128/DSN-MUI/X/2019	Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
129/DSN-MUI/X/2019	Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> akibat Wanprestasi	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
130/DSN-MUI/X/2019	Pedoman bagi lembaga Penjamin Simpanan Dalam pelaksanaan Penanganan atau Penyelsaian Bank Syari'ah yang mengalami Permasalahan Solvabilitas	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
131/DSN-MUI/X/2019	Sukuk Wakaf	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
132/DSN-MUI/X/2019	Perjumpaan Pitang Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
133/DSN-MUI/X/2019	Al-Musarakah al-Muntahiyah bi Tamlik	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
134/DSN-MUI/II/2020	Biaya Riil Sebagai Akibat Dari Penjadwalan Tagihan	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
135/DSN-MUI/V/2020	Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
137/DSN-MUI/IX/2020	Sukuk	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
138/DSN-MUI/V/2020	Saham	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
139/DSN-MUI/VIII/2021	Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
140/DSN-MUI/VIII/2021	Penawaran Efek Syari'ah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
141/DSN-MUI/VIII/2021	Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi syari'ah	الاصل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها



142/DSN-MUI/VIII/2021	Pendapatan LKS Selama masa Konstruksi	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
143/DSN-MUI/VI/2021	Pembiayaan Personal	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
144/DSN-MUI/VI/2021	Marketplace Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
145/DSN-MUI/VI/2021	Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
146/DSN-MUI/VI/2021	Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
147/DSN-MUI/VI/2021	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
148/DSN-MUI/VI/2022	Reasuransi syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
149/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pailit Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
150/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها
152/DSN-MUI/VI/2022	Penghimpunan Dana Dengan Akad Wakalah bil Istitsmar	الاصـل في المعاملة الأباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها

Itu artinya bahwa, kaidah ini mengandung nilai-nilai kontekstualitas hukum Islam yang cukup tinggi dalam pengembangan hukum. Sekaligus menunjukkan bahwa teori kaidah *fiqhiyyah* itu betul-betul ketetapan yang bersifat global yang dapat mencakup beberapa partikular khususnya dalam persoalan *mu'amalah* (ekonomi). Meskipun dalam penggunaan kaidah ini tidak selalu mandiri, masih ada kaidah lain yang digunakan sebagai pendukung kaidah tersebut, seperti Al-Quran dan as-Sunnah.

2. Kaidah

العادة المحكمة²⁹

Artinya:” Menetapkan (suatu hukum) atas dasar ‘urf seperti menetapkan dengan nash”.

²⁹Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarh al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah*, (Beirut: al-Qalam, 1989), h. 219. Lihat juga, Zainal Abidin bin Ibrahim bin al-Nujaim, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1985), h. 93. Al-suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair*, *Ibid.*, h. 63

Ma'ruf al-Dawalibi dan Musyafa Syalabi mengatakan bahwa, jiwa dari semua dalil (*ruh syari'ah*) itu sebenarnya adalah '*urf*'. Sebab tujuan dari penggunaan '*urf*' adalah kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari setiap ketentuan hukum *syari'*. Karena itu, Al-Qarafi dalam tulisannya memberi saran kepada para mujtahid untuk memperhatikan tradisi masyarakat ketika mengeluarkan fatwa agar sejalan dengan kemaslahatan masyarakat tersebut.

Untuk konteks Indonesia, para ulama memperhatikan betul '*adat*' dalam pembentukan hukum. Ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, tentang keberadaan harta bersama dengan pertimbangan bahwa dalam masyarakat Indonesia, baik suami maupun isteri bekerjasama untuk menghasilkan harta dalam rumah tangga,³⁰ pelaksanaan peminangan³¹ dan juga kewarisan anak angkat yang tidak diakui dalam konsep Islam dengan istilah *wasiat wajibah*.³²

Demikian juga dalam bermu'amalah, dalam putusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI), terdapat beberapa kali menggunakan kaidah ini sebagai dasar penetapan hukum, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No. Fatwa	Subyek Fatwa	Kaidah Fiqh
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Hutang	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi syari'ah (Sukuk)	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi syari'ah Mudharabah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Kredit (L/C) Impro Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Kredit (L/C) Ekspor Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	الثابت بالعرف كالثابت بالنص

³⁰Lihat pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, h. 47-50

³¹Lihat pasal 11-13 Kompilasi Hukum Islam, h. 17-18

³²Lihat pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, h. 94



45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility (at-Tashilat al-Saqfiyah)	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syari'ah Mudhrabah Konversi	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
60/DSN-MUI/I/2007	Penyelesaian Utang Dalam Import	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Ekspor	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah Jasa perjalanan Umrah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di LKS	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	الثابت بالعرف كالثابت بالنص
118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syari'ah	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص
130/DSN-MUI/X/2019	Pedoman bagi lembaga Penjamin Simpanan Dalam pelaksanaan Penanganan atau Penyelsaian Bank Syari'ah yang mengalami Permasalahan Solvabilitas	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص
140/DSN-MUI/VIII/2021	Penawaran Efek Syari'ah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Tekhnologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص
141/DSN-MUI/VIII/2021	Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi syari'ah	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص
142/DSN-MUI/VIII/2021	Pendapatan LKS Selama masa Konstruksi	العادة المحكمة



144/DSN-MUI/VI/2021	Marketplace Berdasarkan Prinsip Syari'ah	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص
146/DSN-MUI/VI/2021	Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah	العادة المحكمة الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Tabel di atas menggambarkan bahwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI), dari 152 kasus sejak tahun 2000 sampai 2022, terdapat 27 kasus menggunakan kaidah di atas. Ini menunjukkan bahwa kaidah “*al-Adah al-Muhakkamah*” memiliki kedinamisan dalam mengembangkan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan baru.

Di samping itu, kaidah “*al-Adah al-Muhakkamah*” juga mengandung prinsip dasar adanya kemungkinan perubahan penerapan hukum dengan mempertimbangkan adat sebagai landasan filosofisnya. Ini menunjukkan bahwa hukum yang dibangun atas dasar ‘*adat*’ sangat fleksibel dan adaptif dengan waktu dan tempat. Sebagaimana dikatakan Abdul Wahab al-khallaf. Sebab hukum yang dibangun dengan dasar adat bisa berubah jika maslahat suatu hukum hilang.³³ Jika suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak lagi memberi maslahat diakibatkan adanya perubahan, maka hukum dapat diganti sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Yang demikian di maksudkan agar fiqh tetap sesuai dengan keperluan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Wahbah al-Zuhaily di tempat yang berbeda juga mengatakan hal yang sama. Perubahan hukum dapat terjadi jika terjadi perubahan ‘*urf*’ (adat kebiasaan).³⁴ Demikian juga ulama-ulam lain, seperti Ibn Qayyim, menurut beliau salah satu faktor penyebab perubahan hukum itu adalah perubahan adat dan perkembangan zaman, sebagaimana disebut di dalam kitabnya, “*taghayyaru al-fatwa wa ihtalafhu bihasbi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah wa al-ahwal, wa al-niyyat wa al-‘awa'id*” (perubahan hukum/fatwa karena ada perubahan waktu, tempat, keadaan masyarakat, niat dan adat).³⁵

Jadi kaidah “*al-Adah al-Muhakkamah*” menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, dinamis dan mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Karena itu,

³³Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h.161

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), h. 116

³⁵Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (t.t.p.: Dâr Ibn al-Jauziyah, t.t.), juz, IV, h. 337.



seorang ahli fiqh dituntut untuk mampu melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Bahkan lebih jauh, kaidah ini menuntut ahli fiqh untuk mampu membuat generalisasi dari ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat, karena perubahan ruang dan waktu menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Untuk konteks sekarang misalnya, boleh mengambil upah atau gaji bagi guru ngaji Alquran, khatib shalat Jum'at, imam Masjid, karena adat kebiasaan yang telah berubah.³⁶Kebolehan perempuan menjadi pemimpin dan memangku jabatan publik, yang berbenturan dengan hadits Nabi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin (HR al-Bukhari)". Dan Lain-Lain. Jadi, prinsip kaidah di atas adalah memperhatikan adat dan kondisi masyarakat. Perhatian yang tinggi terhadap adat dan kondisi masyarakat memiliki nilai kontekstualitas hukum Islam yang tinggi, agar hukum Islam itu tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu.

Dua contoh kaidah di atas, "*al-ashlu fil as-syiya al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala tahrimiha*" dan "*al-Adah al-Muhakkamah*" merepresentasikan bahwa kaidah *fiqhiyyah* mampu mengkontekstualisasikan hukum Islam dalam setiap ruang dan waktu yang berbeda-beda. Juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dalam berbagai kondisi, tempat dan waktu tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah.

D. Penutup

Qawa'idh fiqhiyyah atau kaidah-kaidah *fiqhiyyah* pada intinya adalah rumusan yang bersifat umum, disusun dari berbagai persoalan hukum yang memiliki keserupaan *'illat*, dasar pemikiran yang sama dan juga filosofis hukumnya. Kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ini disusun para ulama pada awalnya dimaksudkan untuk memudahkan para ulama fiqh dalam mempelajari hukum-hukum Islam dalam kitab-kitab klasik. Tetapi kemudian berkembang menjadi metode alternatif bagi para ulama belakangan.

Kefleksibelan kaidah *fiqhiyyah* mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dhawabith*, juga dalam setiap hukum cabang tersebut mempunyai keterkaitan dengan satu *manath* (*'illat*/alasan logis) meskipun tema atau obyek yang

³⁶Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Ibid.*, h. 116



berbeda-beda. Menunjukkan bahwa kaidah *fiqhiyyah* sangat tepat dijadikan sebagai metode dan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan menetapkan hukum berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Artinya, kaidah *fiqhiyyah* sebagai salah satu disiplin ilmu ternyata dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul secara mudah, cepat, efektif dan tuntas, tanpa harus mengembalikan persoalan-persoalan hukum tersebut kepada kaidah *ushuliyah* yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Sebab kaidah-kaidah *fiqhiyyah* itu ternyata sarat dengan nilai-nilai kontekstualisasi hukum dan nilai-nilai kedinamisan yang cukup tinggi dalam pengembangan hukum Islam.

REFERENSI

- Ade Dede Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)
- Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th)
- Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991)
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista Surabaya, 2006)
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983
- Al-Qarafi, *al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi al-Anwa' al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1998.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abdurrahman as-Suyuti, *Asybah wa an-Nadzhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- 'Izzudin Abd as-Salam, *Qawa'idh al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th), jilid I
- Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al- Fiqh al- 'amm*, (Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah, 1983), jilid II
- Toha Andiko, Pemberdayaan *Qawa'idh Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern, *Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Muhammad Awwamah, *Atsaral-Hadits al-Syarifi Ikhtilaf Aimmah al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.th)



Abu bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jilid II

Muhammad at-Tamimi, *Arba’ al-Qawa’id Taduru al-Ahkam ‘Alaihi*, (Maktabah al-Misykah)

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lm al-Muwaqqi’in*, (), jilid I, Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, (t.t.p.: Dar Ibn al-Jauziyah, t.t.), juz, IV, h. 337.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawa’idh al-Hakimah Li Fiqhil Mu’amalah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2010)

H.M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah: Dewan Syari’ah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 42-849.

Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarh al-Qawa’idh al-Fiqhiyyah*, (Beirut: al-Qalam, 1989)

Zainal Abidin bin Ibrahim bin al-Nujaim, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1985)

Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri’ al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1999)
Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lâm al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, (t.t.p.: Dar Ibn al-Jauziyah, t.t.), juz, IV